

## **PENGUATAN *GOOD GOVERNMENT* BADAN USAHA MILIK DESA: PERENCANAAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN ASPEK LEGALITAS**

**Baiq Rosyida Dwi Astuti\*, Intan Rakhmawati, Wirawan Suhaedi,  
D Tiarulla Della Nabila**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

**Keywords:**

*Good government,  
BUMDes, Desa  
Gumantar*

**Abstract:** Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang konsep *good government* dan mengidentifikasi permasalahan BUMDes dari sisi tata kelola. Lokasi kegiatan di Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Mataram. Kegiatan dilakukan dengan melakukan pemaparan tentang konsep *good government* dan diskusi antara tim dan audien. Terdapat empat permasalahan BUMDes dari sisi tata kelola yaitu (a) partisipasi pengurus yang rendah, (b) pengendalian internal yang lemah, (c) perencanaan yang tidak memadai dan (d) aspek legalitas. Saran yang diberikan adalah peningkatan partisipasi pengurus melalui perencanaan usaha yang sesuai kebutuhan pengurus; penyusunan pengendalian internal yang memadai dan penyusunan regulasi yang memadai.

*Korespondensi: rosyidaunram@gmail.com*

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan tata kelola yang baik atau *Good Governance* (GG) pada dasarnya merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan. GG Dalam pengelolaan BUMDes, pihak-pihak tersebut adalah penasihat, pengurus dan pengawas BUMDes serta masyarakat. Prinsip-prinsip dalam GG diantaranya adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2004 : 18). Prinsip partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan BUMDes baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip transparansi di BUMDes dapat diaplikasikan dalam bentuk penyediaan informasi penting oleh BUMDes dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan baik itu penasihat dan pengawas BUMdes serta masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik tentang setiap aktivitas yang dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip GG dalam pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya diterapkan. Hasil penelitian Annas (2018) pada beberapa BUMDes di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa pengurus tidak secara aktif menginformasikan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan BUMDes. Konsekuensi dari perilaku tersebut adalah tidak berkembangnya usaha BUMDes karena masyarakat tidak merasa ikut memiliki ataupun berkepentingan terhadap keberlangsungan usaha BUMDes. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wathaniah (2018) dan Cahyanti (2018).

Namun, kondisi BUMDes pada ketiga hasil penelitian di atas berbanding terbalik dengan kondisi BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo DIY. BUMDes tersebut menunjukkan kinerjanya dengan meraih keuntungan sebesar Rp. 53 Milyar pada tahun 2018. Usaha Bumdes Panggung Lestari dimulai dari jasa pengelolaan sampah di sekitar desa. Kemudian BUMDes mengembangkan unit usaha lainnya seperti jasa pengelolaan barang bekas, pengelolaan minyak jelantah dan kampung wisata Mataraman. 95% tenaga kerja BUMDes adalah warga Desa Panggungharjo. Pada sisi lain, website Desa, [www.panggungharjo.des.id](http://www.panggungharjo.des.id), sangat informatif. Website Desa menyediakan berbagai macam informasi desa seperti informasi pembangunan desa, musyawarah desa, BUMdesa dan berbagai macam informasi lainnya. Dua prinsip GCG, prinsip partisipasi dan transparansi, telah dilakukan dengan baik oleh BUMDesa dan Pemerintah Desa Panggungharjo. Pemenuhan dua prinsip GCG tersebut juga sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan prinsip akuntabilitas.

BUMDes Sari Kencana di Desa Gelangsar Kabupaten Lombok Barat memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi sebagian besar BUMDes lainnya. BUMDes Sari Kencana dibentuk pada tahun 2016 dan memulai usaha pertamanya usaha penggemukan sapi. BUMDes Sari Kencana membeli sejumlah sapi dan menyerahkan pengembalaan dan pemeliharaannya kepada masyarakat. Namun usaha tersebut tidak berkembang, bahkan sapi-sapi yang dipelihara mati dan hilang. Selanjutnya, Pemerintah Desa Gelangsar dan Pengurus BUMDes beralih ke usaha dagang. Awal tahun 2019 Bumdes Sari Kencana mengoperasikan BUMDes Mart. BUMDesMart merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Desa dan salah satu pengurus BUMDes. Permodalan berasal dari masyarakat sedangkan toko dan tanah yang ditempati adalah milik Pemerintah Desa. Berdasarkan wawancara awal dengan Ketua BUMDes, hasil penjualan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional BUMDesMart. Di sisi lain, BUMDes memiliki prospek lini usaha yang lain yaitu bisnis spot foto yang dijalankan oleh Kelompok Sadar Wisata (Darwis) Desa Gelangsar. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah (a) memberikan pengetahuan tentang konsep GG dan (b) mengidentifikasi permasalahan BUMDes dari sisi tata kelola.

### **METODE KEGIATAN**

Kegiatan Pengabdian dilakukan di Kantor Desa Gelangsar Kec. Gunung Sari Kab Lombok Barat NTB tanggal 19 Agustus 2018. Peserta kegiatan adalah pengurus BUMDes, Pembina BUMDes dan Kelompok Darwis. Kegiatan pengabdian diawali dengan pemaparan materi tentang konsep GG. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Sesi tanya jawab dan diskusi dilakukan agar pengurus dan Pembina BUMDes dapat mengemukakan permasalahan mereka, mendiskusikannya dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tim PPM menggandeng rekan dari Fakultas Hukum Universitas Mataram sebagai pemateri pendamping. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Pembina BUMDes untuk menghadirkan ahli hukum. Tim juga menilai bahwa GG berhubungan erat dengan aspek legalitas BUMDes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan diskusi dan tanya jawab dengan peserta PPM, berikut permasalahan BUMDes dari sisi tata kelola serta saran atas permasalahan tersebut.

- a) Partisipasi : Pengurus BUMDes yang telah dilantik terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Mereka adalah pengurus BUMDes secara *de jure*, namun *de facto* hanya ketua BUMDes yang berperan aktif dalam operasional dan manajemen BUMDes. Partisipasi yang sangat rendah ini mengakibatkan Ketua BUMDes kewalahan mengelola BUMDes. Tim PPM menyampaikan materi tentang pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengurus dalam menjalankan operasional BUMDes. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab atas kesediaan sebagai pengurus.
- b) Pengendalian internal : BUMDes mempekerjakan beberapa orang karyawan menjadi pelayan BUMDesMart. Kelemahannya adalah BUMDes Mart belum melakukan pengendalian yang memadai untuk pengeluaran kas. Pelayan diberikan kewenangan untuk membeli barang dagangan tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Begitupun setelah pembelian, tidak ada pengecekan tentang kesesuaian jumlah barang yang dibeli dengan bukti pembelian. BUMDes tidak melakukan stok opname persediaan barang dagang akhir periode untuk memverifikasi nilai penjualan dengan jumlah barang terjual. Walaupun BUMDesMart melakukan pencatatan menggunakan aplikasi dan manual, namun itu tidak akan banyak berguna bila tidak dilakukan pengendalian yang memadai. Tim menyarankan BUMDes untuk melakukan hal-hal berikut :
  - *Stock opname* barang dagang pada periode tertentu.
  - Hasil *stock opname* kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi pencatatan, baik pencatatan penjualan harian, pembelian barang dagang, dan pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran lain seperti biaya gaji dan biaya listrik. Berdasarkan perbandingan ini dapat diperoleh informasi tentang kesesuaian pencatatan dengan transaksi serta keuntungan atau kerugian riil BUMDesMart.
  - Pengeluaran dan pemasukan uang BUMDesMart hendaknya dilakukan melalui satu rekening dan disertai dengan pencatatan yang baik.
  - Ketua BUMDes atau yang bertanggung jawab atas operasional BUMDesMart hendaknya melakukan pemeriksaan secara periodik atas pencatatan dan persediaan barang BUMDesMart.
- c) Perencanaan : BUMDes tidak melakukan perencanaan usaha dengan baik. Tercatat ada tiga jenis usaha yang telah dan sedang dijalankan BUMDes namun usaha-usaha tersebut ada yang terpaksa harus dihentikan dan yang lainnya tidak berjalan dengan optimal. Ketua BUMDes saat ini juga merencanakan membangun sebuah bank desa. Perencanaan usaha yang akan dijalankan BUMDes hendaknya memperhatikan kondisi masyarakat sekitar atau trend yang sedang berkembang. Perlu dilakukan perencanaan usaha yang meliputi aspek keuangan, keberlangsungan usaha, analisis pasar, dan analisis SWOT. Perencanaan yang baik menjadi dasar dan cermin awal atas setiap tindakan yang dilakukan pada masa yang akan datang.

- d) Aspek legalitas : BUMDes belum memiliki payung hukum yang kuat. Pendirian BUMDes dilakukan tahun 2016 dan pengurus pun telah dilantik, namun tidak ada payung hukum yang mendasari pendirian dan pengelolaan BUMDes. Tidak ada perdes tentang pendirian BUMDes, begitupun dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes. Penyusunan perdes adalah kewajiban pemerintah desa sedangkan penyusunan AD dan ART adalah tanggung jawab pengurus BUMDes. Penyusunan produk hukum membutuhkan diskusi mendalam yang relatif panjang untuk mengakomodasi maksud dan tujuan produk hukum tersebut. Narasumber dari FH Unram mengajukan diri untuk terlibat dalam penyusunan legalisasi BUMDes. Pihak Fakultas Hukum siap dihubungi untuk datang bersama-sama dengan aparat desa dan masyarakat menyusun peraturan desa dan produk hukum lainnya. Aspek legalitas terkait erat dengan konsep kerja dan operasional BUMDes. Sebagai contoh adalah hubungan kerja dan organisasi BUMDes dengan Kelompok Darwis (Sadar Wisata) Desa Gelangsar. Kelompok Darwis memiliki usaha spot foto yaitu Bukit Bintang Tiga Rasa yang menjadi destinasi baru favorit dan menghasilkan pendapatan jutaan rupiah setiap minggu. Tahun 2019 kelompok darwis memperoleh bantuan keuangan dari Kemendes PDTT bernilai ratusan rupiah. Kepengurusan dan kepemilikan usaha kelompok darwis berbeda dengan BUMDes. Kelompok Darwis memperoleh pendapatan yang menjanjikan, namun di sisi lain BUMDes masih kesulitan bahkan untuk membayar gaji pegawai. Kedua hal tersebut kontradiktif mengingat BUMDes dan kelompok darwis berada dalam satu desa dan sama-sama memperoleh sebagian modalnya dari pemerintah desa. Dibutuhkan kejelasan hukum tentang posisi kelompok darwis dalam tata organisasi pemerintahan desa. Jika kelompok darwis disatukan perorganisasiannya dengan BUMDes dengan menjadi salah satu unit usaha BUMDes, maka akan memberikan manfaat bagi BUMDes dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban modal akan lebih mudah dilakukan karena BUMDes berkewajiban melakukan pelaporan dan pembukuan seperti yang dipersyaratkan Permendesa PDTT No 4/2015. Jika tidak, BUMDes dapat bekerja sama dengan kelompok darwis untuk mengelola usaha tersebut.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, terdapat empat masalah BUMDes dari sisi tata kelola yaitu partisipasi pengurus yang rendah, pengendalian internal yang lemah, perencanaan yang tidak memadai dan tidak memiliki aspek legalitas yang memadai. Saran yang diberikan adalah peningkatan partisipasi pengurus melalui perencanaan usaha yang dapat mengakomodir kebutuhan pengurus; pembuatan dan pengembangan pengendalian internal yang memadai dan penyusunan produk hukum yang mendukung tata organisasi dan sistem kerja BUMDes.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Annas, Muhamad, 2018, Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
- Cahyanti, Eka Wiwik, 2018, Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Lombok Barat (Studi Empiris di Kecamatan Narmada, Lembar dan Sekotong), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
- Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa
- Wathoniah, Nurul, 2018, Analisis Pengelolaan Usaha, Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (Studi empiris pada BUMDes di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

[www.panggunharjo.desa.id](http://www.panggunharjo.desa.id)